

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN TERHADAP
TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2021
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, Jawa Timur)**

Vena Syaharani¹, Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: vennasaharani22@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menguji pengaruh dari akuntabilitas, transparansi terhadap tata kelola keuangan daerah pada pengelolaan APBD di masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Sampel penelitian yaitu 38 orang pegawai dari BKAD Kota Batu serta Kepala Bidang Anggaran. Adapun untuk Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan 38 responden. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan data wawancara yang dibagikan langsung kepada calon responden dan data wawancara yang berasal dari Kepala Bidang Anggaran. Metode Analisa yang digunakan yakni uji normalitas dan uji heterokedastisitas untuk dapat menguji hipotesis secara simultan. Adapun untuk hasil penelitian serta uji hipotesis yakni pengaruh akuntabilitas tidak berpengaruh pada tata kelola keuangan dan transparansi berpengaruh signifikan pada tata kelola keuangan secara parsial dan simultan. Dari hasil penelitian sebaiknya pengelolaan APBD oleh BKAD Kota Batu untuk dapat lebih meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pada tata kelola anggaran di BKAD Kota Batu.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Dalam tatanan normatif, sesuai dengan pernyataan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Peraturan Gubernur Tahun 50 Tahun 2020 yang membahas tentang Perubahan Keempat Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, Peraturan Walikota (Perwali) atas Perubahan Kelima Nomor 97 Tahun 2019 tentang

APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2021 yang membahas tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang telah menjadi Undang-Undang telah melahirkan peraturan dan paradigma baru pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang kemudian diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya sistem kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan serta tidak lupakan peran serta masyarakat di dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2006) penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal ini telah berdasarkan undang-undang yang menciptakan suasana baru, yakni gesernya kewenangan pemerintah terhadap sistem sentralis birokratis kepada pemerintah dengan sistem desentralis partisipatoris. Sebagai bagian dari organisasi pemerintahan/organisasi sektor publik. Dalam hal ini pemerintah daerah diharuskan untuk dapat mempunyai kinerja yang dapat berorientasi pada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi serta mendorong kinerja agar lebih tanggap dan cepat dengan memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat bisa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik.

Kewajiban melayan masyarakat ini menjadi sebuah tuntutan bagi sektor publik untuk dapat mengabdikan kepada negara dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan sebagai bagian dari komponen suksesnya program-program dari organisasi sektor publik. Dalam tatanan teoritis yang kemudian berhubungan dengan tanggung jawab dari organisasi sektor publik untuk mengabdikan kepada masyarakat, dalam hal ini sesuai dengan pengertian dari akuntabilitas yang dianggap sebagai salah satu bentuk perwujudan dari prinsip *good*

governance. Menurut Dwiyanto (2008:98) mengatakan bahwasanya akuntabilitas merupakan suatu perwujudan atas besarnya tanggungjawab aparat tentang kebijakan pada proses pelayanan publik yang kemudian dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan.

Tanggung jawab yang dimaksud yakni atas keberhasilan ataupun kegagalan pada pelaksanaan misi dari organisasi pada saat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh alat pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Kemudian akuntabilitas kerja ini akan menjelaskan masing-masing indikator sasaran yang berisikan target dengan implementasinya. Uraian target serta pelaksanaan implementasinya kemudian akan dijelaskan pada hasil evaluasi kerja apakah kinerja para pegawai tersebut mengalami penurunan ataupun peningkatan.

Adapun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan rencana keuangan dari pemerintah daerah selama periode 1 tahun kerja yang kemudian ditetapkan oleh peraturan daerah yang dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan publik tentang sistem prioritas pengalokasian dana yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah melalui koordinasi langsung dengan lembaga legislatif yang mana dalam hal ini DPRD.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa pandemi covid-19 ini juga dinilai sebagai informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan sangat transparan. Dikarenakan pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan seluruh sektor melemah, termasuk ekonomi dan kesehatan. Dalam hal ini dana anggaran dari APBD lebih ditujukan kepada penanganan covid-19 untuk meningkatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat yang ada di daerah dan seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak. Sedangkan dalam tatanan aspek empiris, akuntabilitas juga berlaku pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa pandemi covid-19.

Dalam hal ini, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) merupakan perangkat daerah yang ada pada pemerintah daerah yang memiliki fungsi sebagai pusat dari seluruh pertanggungjawaban keuangan daerah. Adapun fenomena yang tengah terjadi di Kota Batu saat ini yang menjadi akar permasalahan yang diambil oleh penulis pada pembahasan ini yaitu :

1. Pada dasarnya, aspek pengelolaan anggaran dari APBD merupakan salah satu faktor penting yang sangat berhubungan dengan fungsi pengelolaan pembangunan daerah. Namun pengelolaan terhadap serapan anggaran Pemerintah Kota Batu hanya tercatat sebesar

52,43% yang dikhawatirkan untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2021 akan membesar

Menurut pernyataan dari Kanal Berita Batuhits.com 2021, adapun rincian dari serapan anggaran sebesar 52,43% ini adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah APBD Kota Batu Tahun 2021 masih terbelanjakan sebesar Rp. 609,4 miliar dari Rp. 1,1 Triliun
 - b. Anggaran yang dibelanjakan masih kurang Rp. 400 Miliar Menurut pernyataan dari Wakil Walikota Batu, Punjul Santosobahwasanya serapan anggaran yang masih senilai 52,93% ini berasal dari pekerjaan fisik yang sifatnya masih belum terbayarkan.
 - c. Pengerjaan fisik ini seperti pada pembangunan relokasi kios permanen yang digunakan untuk para pedagang pasar besar Kota Batu yang berlokasi di Stadion Brantas dengan biaya Rp. 4,6 Miliar
 - d. Selain itu terdapat pembangunan jembatan Sisir-Pandanrejo serta pelebaran jembatan di daerah Temas-Pandanrejo senilai Rp 500 juta, pembangunan Perpustakaan Kota Batu senilai Rp 1,9 Miliar, pembangunan rumah kemas dengan nilai Rp. 1,3 Miliar dan lain-lain.
 - e. Dikarenakan terdapat adanya pembangunan fisik yang tengah berlangsung, maka harapan dari wakil walikota ini agar dapat dimaksimalkan hingga akhir tahun 2021 yang dapat menekan jumlah SILPA 2021 yang akan lebih rendah dari SILPA 2020 yang senilai Rp. 261 Miliar.
2. Dengan adanya permasalahan ini, pemerintah Kota Batu sebagai aparaturnegara mencari cara untuk memberikan solusi terkait masalah pengelolaan APBD tentang penyerapan anggaran yang masih belum maksimal sesuai target yang diperkirakan sebelumnya yakni hanya separuh dari jumlah anggaran. Serapan anggaran yang hanya 52,43% ini berasal dari banyak pekerjaan yang masih belum terbayarkan, terutama pada fisik bangunan yang belum selesai serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diperkirakan akan dapat maksimal dengan bantuan SKPD Kota Batu dengan menyelesaikan program-programnya dengan target 90% hingga akhir tahun 2021.
3. Bukan hanya Kota Batu saja, tetapi seluruh Kabupaten dan Kota di Malang Raya untuk penyerapan APBD Tahun 2021 dinilai masih rendah dan juga dianggap tidak maksimal untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga pada bulan Oktober 2021 menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DPJK) Kementerian Keuangan untuk tingkat penyerapan anggaran untuk Kabupaten Malang hanya senilai 62,15%, Kota Malang senilai 49,40% dan yang terakhir Kota Batu yang mencapai 52,43%.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dari Kota Batu yang menjadi daerah Kota Otonom dengan memperhatikan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu yang memiliki kewajiban untuk dapat mengelola aset dan juga anggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, memperhatikan pada ketentuan terkait pengelolaan anggaran juga menjadi suatu elemen penting pada *penilaian good governance* yang dalam ini akuntabilitas dan transparansi di dalam menangani tata kelola keuangan dan aset daerah.

Di samping itu, memperhatikan pada ketentuan terkait pengelolaan anggaran juga menjadi suatu elemen penting pada *penilaian good governance* yang dalam ini akuntabilitas dan transparansi di dalam menangani tata kelola keuangan dan aset daerah. Dalam hal ini berhubungan fungsi dari APBD sendiri yakni sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tingkatan daerah pada tahun anggaran berikutnya serta untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah

Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021?

Tinjauan Pustaka

Akuntabilitas Publik

Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas pada definisi sempit berarti sebuah bentuk tanggung jawab untuk siapa saja yang ada di dalam organisasi (ataupun pekerja individu) yang akan bertanggung jawab apa dan untuk apa organisasi tersebut bertanggung jawab. Sedangkan pada definisi luas, akuntabilitas dapat diartikan pada kewajiban pihak dari pemegang amanah/pesan (*agent*) yang sifatnya memberikan bentuk pertanggungjawaban, menyajikan data dan melaporkan data serta mengungkapkan semua bentuk aktifitas yang telah menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah/pesan (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk dapat meminta bentuk pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi Anggaran

Transparansi merupakan bentuk kesediaan

informasi yang cukup, akurat serta tepat waktu yang ada di dalam kebijakan publik dan pada proses pembentukannya. Informasi yang dimaksud yakni pentingnya kebutuhan kepada masyarakat untuk dapat kemudian berpartisipasi pada pengelolaan keuangan yang ada di daerah. Dengan adanya informasi, masyarakat bisa sekaligus dapat

Tata Kelola Keuangan Daerah

Untuk tata Kelola keuangan di daerah masih sama dengan tata Kelola keuangan di tingkatan pusat. Pada pemerintahan daerah khususnya di provinsi dan di kabupaten/kota juga sama-sama dapat menyusun bentuk perencanaan dan juga pengelolaan keuangan yang akan direncanakan pada 1 tahun periode anggaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian Peraturan Gubernur Tahun 50 Tahun 2020 yang membahas tentang Perubahan Keempat Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, Peraturan Walikota (Perwali) atas Perubahan Kelima Nomor 97 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2021 yang membahas tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang telah menjadi Undang-Undang telah melahirkan peraturan dan paradigma baru pada pelaksanaan pemerintahan daerah.

Anggaran dalam hal ini yang dimaksud dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah yang kemudian menjadi dasar acuan pada seluruh pendapatan daerah dan juga belanja daerah pada satu periode anggaran, serta tujuan untuk melaksanakan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu. Adapun untuk semua pemungutan pada penerimaan daerah memiliki tujuan untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada APBD.

Pandemi Covid-19

Seperti yang kita ketahui bahwasanya penyebaran covid-19 di Indonesia relatif sangat cepat. Dapat kita ketahui pada kasus pertama serta kedua covid-19 yang pertama kali diumumkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 2 Maret 2020 dan untuk kasus ketiga dan keempat diumumkan 4 hari setelahnya yakni 6 Maret 2020. Sementara itu, adanya Keputusan Presiden (Keppres) No. 7/2020 tentang adanya pembentukan *Rapid-*

Response Team yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru saja keluar pada tanggal 13 Maret 2020 disaat jumlah dari pasien yang terjangkit covid-19 berjumlah 69 orang.

Setelah terbentuknya Keppres tersebut, Kepala BNPB memutuskan bahwasanya covid-19 adalah situasi darurat yang sifatnya non alam. Kemudian untuk kasus pertama dan kedua yang ada di Indonesia terjadi pada sebuah acara klub dansa yang ada di Jakarta. Kedua orang ini diduga tertular virus covid-19 dari warna negara asing yang juga berada di tempat tersebut yang juga terjangkit covid-19 di luar negeri sesudah mengikuti acara tersebut. Dengan ini, Dinas Kesehatan serta Kepolisian melakukan kegiatan tracing dengan berhasil menemukan kurang lebih 80 orang yang melakukan kegiatan kontak dengan pasien positif ini pada acara tersebut. Setelah melakukan pengujian bahwasanya dua orang ini dinyatakan positif covid-19 yang selanjutnya menjadi kasus ketiga dan keempat. Untuk kasus kelima dinyatakan masih berhubungan dengan kluster/kelompok dari klub dansa yang ada di Jakarta.

Setelah adanya kasus kelima, ditemukan beberapa temuan berupa imported cases yang terjadi pada kasus keenam yakni WNI dari anak buah kapal (ABK) dari kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya melakukan karantina dalam kurun waktu 14 hari di Jepang dikarenakan salah satu penumpang dinyatakan positif covid-19. Pada saat yang sama, ditemukan juga banyak imported cases yang lain yang berasal dari WNI yang baru pulang bepergian ke luar negeri.

Kasus semakin banyak dengan penularan yang relatif cepat hingga mencapai 1000 kasus secara nasional¹², yang mana lebih dari 50% kasus positif covid-19 ada di DKI Jakarta¹³. Kemudian terjadi penambahan kasus baru sebanyak 153 orang tanggal 27 Maret 2020 saat kasus positif di Indonesia mencapai 1000 kasus dan 83 kasus yang baru ditemukan di DKI Jakarta.

Kemudian mulai terjadinya identifikasi kluster/kelompok besar lain yang mana proses dari infeksi virus ini terjadi sebelum kasus pertama telah diumumkan oleh pemerintah. Kluster/kelompok ini berasal dari forum pertemuan yang mendatangkan banyak orang dan juga orang-orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya terdapat 4 kluster besar yang telah teridentifikasi yang terbentuk di provinsi Jawa Barat. Adapun untuk 4 kluster ini telah berkembang menjadi *super spreader* yang menjadi *carrier* ke daerah yang lain.

Untuk kluster pertama, terjadi pada acara Seminar Bisnis Syariah di Kota Bogor pada tanggal 25-28 Februari 2020 yang dihadiri sebanyak 200 peserta. Empat orang dari peserta seminar tersebut berasal dari Solo, Jawa Tengah yang dinyatakan

positif covid-19 yang kemudian dinyatakan positif dan dua diantaranya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020.

Kluster kedua berasal dari acara seminar keagamaan Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang berada di Lembang, Bandung Barat pada tanggal 3-5 Maret 2020. Untuk pendeta dari pimpinan GBI dinyatakan positif covid-19.

Kluster ketiga yakni pada acara Persidangan Sinode Tahun GPIB yang dilakukan di Kota Bogor pada 26-29 Februari 2020 yang dihadiri oleh kurang lebih 600 peserta. Walikota Bogor Bima Arya kemudian juga dinyatakan positif covid-19 dikarenakan ikut menghadiri acara tersebut. Terdapat satu peserta yang berasal dari Bandar Lampung yang juga dinyatakan positif covid-19. Kemudian hasil tes yang keempat jemaatnya dari Kota Bogor juga dinyatakan positif covid-19.

Kluster keempat yakni acara dari Musyawarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 9-10 Maret 2020. Diikuti oleh kurang lebih 400 orang peserta yang mana tujuh orang dinyatakan positif covid-19, termasuk Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana, Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana serta Walikota Bogor Bima Arya.

Kondisi Covid-19 Tahun 2021

Kasus harian yang terus meningkat mengakibatkan pandemi covid-19 yang berawal dari tahun 2020 kemudian masih berlanjut hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan terlihat dari beberapa indikator pada pandemi, seperti halnya jumlah kasus harian yang tinggi, kasus aktif dan juga kematian yang disebabkan oleh covid-19. Untuk rekor tertinggi pada *positivity rate* di Indonesia yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 yang mencapai angka 36,18% atau 7x lipat dari batas aman yang telah ditetapkan oleh WHO yakni sekitar 5%. Sedangkan pada rekor jumlah kematian harian yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 mencapai 476 orang.

Angka kematian (*Case Fatality Rate/CFR*) yang terjadi di Indonesia juga cukup tinggi yakni 2,8% di atas rata-rata CFR global yang hanya sekitar 2,3%. Di sisi lain untuk kasus positif covid pada tanggal 3 Februari 2021 yang mencapai 175.236 kasus ataupun meningkat sebanyak 15,8% dari kasus yang telah terkonfirmasi. Fenomena terjadinya kasus positif yang menyebabkan beberapa dampak yakni meningkatnya keterisian tempat tidur pasien di rumah sakit atau yang disebut *Bed Occupancy Rate (BOR)* dan tenaga medis yang kewalahan untuk melayani pasien terkonfirmasi positif yang apabila kondisi tersebut tidak segera untuk diatasi maka jumlah kematian juga akan terus naik.

Terdapat beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat menekan laju

penularan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, tetapi pada kondisi di lapangan tampak kurang efektif. Bahkan kasus terkonfirmasi semakin meningkat sebanyak 14.518 kasus pada tanggal 30 Januari 2021. Meskipun telah ditetapkan kebijakan PPKM tetapi mobilitas dan aktivitas warga juga masih cukup tinggi. Padahal untuk pengurangan mobilitas dan aktivitas warga adalah kunci untuk dapat memutus mata rantai dari penularan covid-19.

Metode Penelitian

Peneliti juga memutuskan untuk menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (campuran) untuk metode penelitian yang akan berlandaskan pada filsafat positivisme yakni berfungsi untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang mana pengumpulan data akan menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang sifatnya kuantitatif/statistik dan kualitatif yang memiliki tujuan untuk dapat menguji hipotesis yang kemudian ditetapkan.

Adapun untuk penelitian kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah keempat yang berkaitan dengan factor pendorong dan factor penghambat dari pengelolaan anggaran APBD yang dilakukan oleh BKAD Kota Batu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dengan berdasarkan pada pengamatan situasi tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun atau di manipulasi. Peneliti kemudian harus terjun langsung di lapangan untuk mengumpulkan hasil dari wawancara yang kemudian dapat didokumentasikan melalui hasil tertulis, foto dan video.

Untuk penelitian kuantitatif deskriptif yang akan digunakan pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui nilai variabel mandiri, yakni pada satu variabel atau lebih tanpa membuat bentuk perbandingan ataupun menghubungkan dengan variabel yang lainnya.

Setting dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu hal yang penting bagi peneliti memperoleh data dengan pengambilan dan sampel yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Adapun untuk tujuan penetapan lokasi penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui lebih jelas sasaran dari objek yang diteliti. Lokasi dan alamat lengkap instansi yang digunakan untuk pengambilan data yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu yang bertempat di Jl. Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu

Alasan mengapa mengambil sampel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan instansi ini dianggap sebagai lembaga yang dianggap berperan penting pada pengelolaan anggaran dan aset yang berasal dari APBD yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan di dalam

lingkup wilayah Pemerintah Kota Batu selama pandemi Covid-19 yang relevan dengan judul penelitian yakni akuntabilitas terhadap tata Kelola serta transparansi keuangan daerah selama pandemi covid-19.

Populasi dan Sampling Penelitian

Populasi yang ada di dalam penelitian ini yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu. Kemudian untuk sampel pada penelitian ini yakni pada semua bidang di BPKAD. Sedangkan pada pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel dari non probabilitas yang dapat memenuhi standar pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dilakukan dikarenakan berbagai faktor berikut :

1. Pihak pengguna dan kuasa atas anggaran dan aset yang dipegang oleh pejabat tingkat struktural yang paling tertinggi pada pengelolaan anggaran dan aset daerah yakni dalam hal ini BPKAD untuk dapat bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan pada unit kerja masing-masing (sub bidang).
2. Sebagai pejabat pengelolaan anggaran dan aset, BPKAD memiliki tugas untuk melakukan menyiapkan data dan juga merencanakan program yang ada di bidang pengelolaan keuangan serta aset, memiliki fungsi untuk dapat merumuskan kebijakan teknis yang ada di bidang pengelolaan keuangan dan juga aset serta melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan hingga koordinasi yang ada di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Responden dari penelitian ini adalah pegawai BPKAD pada dua bidang yakni bidang keuangan dan aset yang bertindak sebagai pengguna atas anggaran dan aset sebanyak 38 orang. Adapun untuk alasan dari pengambilan sampel atau cluster yang berjumlah 38 orang adalah jumlah pegawai yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Adapun terdapat 3 jenis poin pertanyaan yang akan digunakan di dalam kuesioner untuk menjadi variabel penelitian yakni sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pada publik untuk setiap aktivitas yang telah atau akan dilakukan. Dalam hal ini mengacu pada akuntabilitas publik dari BPKAD Kota Batu dalam pengelolaan APBD sebagai sumber dana bagi program-program yang dicanangkan.
2. Pengelolaan Anggaran
Merupakan kegiatan yang berupa penyusunan rencana kerja hingga pada pencatatan pada

sistem akuntansi pemerintah dan penyusunannya. Dalam hal ini BPKAD memiliki tugas dan wewenang dengan salah satunya berhak untuk mengelola keuangan dan aset daerah di dalam lingkup pemerintahan Kota Batu.

3. Transparansi Anggaran

Merupakan bentuk keterbukaan informasi tentang keuangan publik kepada masyarakat agar publik dapat mengetahui dan mengakses informasi pada aktivitas keuangan pemerintah terutama pada saat pandemi covid-19 di Kota Batu. Untuk laporan keuangan yang disampaikan dengan cara melakukan Kerjasama yang dilakukan dengan media massa serta lembaga non pemerintah yang bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima serta dapat diakses oleh pengguna informasi. Setiap poin pertanyaan yang akan diuji realibilitas dan validitasnya. Untuk dapat mengukur poin-poin tersebut menggunakan skala interval yang paling rendah pada skor terendah yakni 1 dan skor tertinggi pada skor 5. Instrumen ini dipilih oleh penulis karena penggunaannya sudah sangat umum untuk digunakan pada penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sinambela (2003) dan juga Poerwati (2002).

Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner sebagai seperangkat dari beberapa pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang akan diberikan pada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016). Pertanyaan maupun pernyataan pada kuesioner kemudian akan berkaitan dengan akuntabilitas BPKAD, pengelolaan anggaran dan transparansi anggaran

2. Kuesioner

Kuesioner ini digunakan sebagai alat kumpul dari data-data utama dikarenakan penelitian ini sifatnya kuantitatif. Kuesioner berisi tentang pertanyaan dan pernyataan untuk responden. Adapun menurut Suwartono (2014) bahwasanya kuesioner tertutup merupakan jenis kuesioner yang terdiri dari jumlah dari butir pertanyaan ataupun pernyataan pada jumlah opsi yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan kuesioner tertutup dengan menyediakan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan dengan jumlah dari opsi yang sudah ditentukan dan responden akan diminta untuk memilih opsi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penulis menggunakan Skala Likert yang digunakan untuk menilai akuntabilitas

publik, pengelolaan anggaran dan transparansi anggaran yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu. Menurut pernyataan dari Sugiyono (2015:166) bahwasanya akan dihubungkan dengan bentuk pernyataan untuk dapat diungkapkan dengan kata-kata serta digunakan untuk keperluan kuantitatif yang mana jawaban tersebut dapat diberikan skor sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	1	Setuju	4
Tidak Setuju	2	Sangat Setuju	5
Netral	3		

3. Wawancara

Berupa catatan beberapa pertanyaan yang tertuang dalam daftar pertanyaan dengan tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yang berupa keterangan ataupun kondisi objektif dengan berdasarkan pada lokasi penelitian serta sampel yang akan diteliti yang berkaitan dengan objek penelitian.

Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang di dalamnya menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* merupakan skala yang di dalamnya terdapat tingkatan prefensi tiap jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk prosedur pada saat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang kemudian akan mengirimkan kuesioner kepada responden. Kuesioner akan langsung didistribusikan kepada responden dan kemudian akan diambil kembali oleh peneliti dalam kurun waktu satu minggu setelah kuesioner diberikan. Pengiriman dan juga pengambilan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian dari kuesioner yang tinggi. Adapun menurut Dillman dalam Cooper dan juga Schindler (2001) menyatakan bahwasanya tingkat pengembalian dari kuesioner apabila mencapai persentase 30% dianggap memiliki hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, pengembalian kuesioner juga akan dinilai oleh penulis untuk dimasukkan pada lampiran kuesioner beserta dengan persentase pengembaliannya kuesionernya.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan pada

penelitian ini terdiri dari teknik statistik deskriptif, uji kualitas data dan juga uji klasik serta pengujian hipotesis.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini memiliki fungsi untuk memberikan suatu gambaran tentang demografi dari responden. Gambaran ini terdiri dari tendensi sentral yakni rata – rata, median, modus serta perkiraan standar deviasi yang digunakan untuk memperjelas deskripsi dari responden.

Uji Kualitas Data

Uji Kualitas Data digunakan untuk menguji kualitas data yang akan dilakukan dengan melalui 3 aspek prosedur yakni sebagai berikut :

1. Uji realibilitas, yakni memiliki fungsi untuk menguji sejauh mana hasil dari pengukuran akan tetap konsisten, jika melakukan pengukuran dua kali ataupun lebih pada gejala yang sama dengan alat ukur yang sama pula. Uji realibilitas digunakan dengan uji statistic yang diciptakan *Cronbach's Alpha*, yakni suatu konstruksi ataupun variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6.
2. Uji validitas digunakan untuk dapat memastikan bahwasanya masing-masing dari pertanyaan akan dapat terklarifikasi dengan jelas pada berbagai variabel yang sudah ditentukan (*Construct Validity*)

Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian statistik yang menggunakan analisis regresi yang dilakukan dengan cara melakukan pertimbangan tentang tidak adanya pelanggaran pada asumsi-asumsi yang klasik. Asumsi-asumsi klasik ada dua yakni sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Adapun pengujian dari normalitas data yang akan dilakukan dengan melihat satu koefisien dari *Cronbach Alpha*, yakni nilai reabilitas yang digunakan dilihat berdasarkan masing-masing dari instrumen yakni > 0,6 akan dianggap reliabel dengan berdasarkan pernyataan dari Nunnally (dalam Ghozali, 2006).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah di dalam suatu model dari regresi tersebut terjadi ketidaksamaan dari varian dari suatu residual yang berasal dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan model variasi yang berbeda. Model dari regresi dianggap baik apabila jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, pengujian ini digunakan untuk melihat ada tidaknya pola tertentu yang ada di dalam grafik *Scatterplot* yang terjadi antar *SRESID* dan

ZPRED yang manadasar analisisnya yakni sebagai berikut :

1. Apabila terdapat titik-titik yang kemudian membentuk suatu pola tertentu yang sifatnya teratur dan juga bergelombang, melbar dan juga menyempit maka akan terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila tidak ada titik-titik yang membentuk pola secara jelas yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 di sumbu Y maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam model regresi.

Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis kemudian akan dikembangkan untuk persamaan yang menyatakan bahwasanya hubungan antar variabel yang tidak bebas yakni Y (yang dimaksud dalam hal ini yakni pengelolaan APBD) dengan variabel yang bebas. Adapun pengujian dari hipotesis ini dilakukan dengan cara menganalisis regresi berganda yang kemudian akan diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Kemudian juga akan diuji secara parsial yang diformulasikan dengan rumus berikut ini

$$X_1 - Y$$

$$X_2 - Y$$

$$X_{1+2} - Y$$

Keterangan :

Y = Tata Kelola Keuangan pada Pengelolaan APBD

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi Keuangan Daerah

β₁ = Koefisien regresi akuntabilitas

β₂ = Koefisien Transparansi Keuangan Daerah

α = Konstanta

Dalam hal ini, X₁ dan X₂ akan diuji dengan cara membandingkan tingkat signifikansi $t < 0.05$, maka hipotesis akan diterima. Jika tingkat signifikansi senilai < 0.05 maka dapat diartikan pengaruh akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan pada tata kelola anggaran dan transparansi keuangan daerah selama pandemi covid-19 tahun 2020 hingga 2021.

Hipotesis

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara Akuntabilitas (X₁) dengan Tata Kelola (Y)

H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara Transparansi (X₂) dengan Tata Kelola (Y)

H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara Akuntabilitas (X₁) dan Transparansi (X₂) dengan Tata Kelola (Y)

Pembahasan

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu memiliki tugas untuk dapat menyiapkan sebuah perumusan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berdasarkan pada penyusunan rancangan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset daerah dan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD serta pembinaan tentang administrasi untuk pengelolaan keuangan pada SKPD/desa. Adapun untuk fungsi dari BKAD antara lain sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan untuk kebijakan serta pedoman pada penyusunan APBD
2. Menyiapkan bahan yang digunakan untuk rancangan APBD serta rancangan pada perubahan dari APBD
3. Menyiapkan kebijakan serta pedoman pada pelaksanaan APBD
4. Melaksanakan bentuk-bentuk pengesahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
5. Melaksanakan penetapan pada Surat Penyedia Dana (SPD)
6. Melaksanakan penerbitan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

4.1

4.2

Dasar Hukum Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

Dasar hukum dari pembentukan BKAD Kota Batu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 yang berkaitan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Penjabaran dari Tugas serta Fungsi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.

Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

Menurut Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2020 yang berisi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi beserta dengan Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah bahwasanya Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebuah instansi pemerintahan yang memiliki tugas mengelola keuangan serta aset daerah yang dimulai dari perencanaan hingga pada pertanggungjawaban atas APBD Kota Batu.

Sumber Daya Manusia di BKAD Kota Batu

Jumlah pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu berdasarkan pada data terakhir Maret 2022 berjumlah 76 pegawai. Adapun untuk

jumlah pegawai BKAD Kota Batu yakni sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Pegawai BKAD Kota Batu

No.	Pegawai	Jumlah	%
1.	PNS	57	75,1%
2.	Honorar (Non PNS)	8	10,5%
3.	Outsourcing (NonPNS)	11	14,4%
Jumlah		76	100%

Sumber : BKAD Kota Batu 2022

Tabel
Susunan Pegawai BKAD Kota Batu Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah		
		PNS	Honorar	Outsourcing
1.	Golongan IV	3	0	0
2.	Golongan III	39	0	0
3.	Golongan II	15	0	0
4.	Golongan I	0	0	0
5.	Tidak ada Golongan	0	8	11
Jumlah		57	8	11

Sumber : BKAD Kota Batu 2022

Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk penarikan sampel yang digunakan yakni dengan metode *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel dari non probabilitas yang dapat memenuhi standar pertimbangan tertentu. Kemudian peneliti akan melakukan pengolahan data dari kuesioner yang telah disebar ke BKAD Kota Batu dan disebar ke 38 orang pegawai.

Statistik Deskriptif Variabel

Pada kuesioner penelitian ini terdapat bagian tentang pernyataan bentuk skala likert pada masing-masing variabel, baik variabel dependen ataupun independen. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian berhubungan dengan akuntabilitas, transparansi dan tata kelola. Di dalam kuesioner tersebut terdapat 25 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni 10 pertanyaan untuk variabel akuntabilitas, 10 pertanyaan untuk variabel transparansi dan 5 pertanyaan untuk variabel tata Kelola.

Untuk dapat memudahkan penilaian dari jawaban para responden, maka digunakan kriteria pengukuran menggunakan skala likert dari nilai 1 sampai dengan nilai 5. Skala 1 menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju (STS), skala 2 menunjukkan tidak setuju (TS), skala 3 menunjukkan netral (N), skala 4 menunjukkan setuju (S) dan skala

5 menunjukkan sangat setuju(SS). Kemudian kita harus mencari rata-rata dari setiap jawaban, oleh karena itu untuk dapat memudahkan penilaian dari rata-rata maka dibuatlah suatu interval dengan kelas interval sebanyak 5 dan angka indeks yang akan dihasilkan dimulai dari angka 1,00 – 5,00. Adapun untuk kriteria yang digunakan pada interpretasi nilai indeks yakni sebagai berikut :

1. 1,00 – 1,79 = sangat rendah
2. 1,80 – 2,95 = rendah
3. 2,60 – 3,39 = sedang
4. 3,40 – 4,19 = tinggi
5. 4,20 – 5,00 = sangat tinggi

Uji Validitas

Uji validitas dalam hal ini digunakan untuk mengetahui suatu kevalidan ataupun suatu kesesuaian dari kuesioner yang digunakan peneliti untuk dapat mengukur serta memperoleh data penelitian yang berasal dari responden. Adapun dasar pada pengambilan dari uji validitas pearson yakni sebagai berikut :

Perbandingan nilai r hitung dengan r tabel

- a. Apabila nilai r hitung > r tabel dianggap **valid**
- b. Apabila nilai r hitung < r tabel dianggap **tidak valid** Kemudian cara untuk mencari nilai r tabel dengan N = 38 pada signifikansi 5% yang ada pada distribusi nilai r tabel statistik, maka akan mendapatkan r tabel sebesar 0,320

1. Uji Validitas Akuntabilitas (X1)

Pada uji validitas pada akuntabilitas (X1) yang diolah dengan SPSS 25 maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

No Item	R tabel	R Hitung	Status Data
X1	0.320	0,322	Valid
X2	0.320	0,428	Valid
X3	0.320	0,492	Valid
X4	0.320	0,494	Valid
X5	0.320	0,340	Valid
X6	0.320	0,420	Valid
X7	0.320	0,365	Valid
X8	0.320	0,356	Valid
X9	0.320	0,440	Valid
X10	0.320	0,300	Tidak Valid

Sumber : SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil dari uji validitas pada variabel akuntabilitas (X1) menggunakan SPSS 25 dengan rata-rata status data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada variabel akuntabilitas (X1) bersifat valid.

**Tabel
Uji Validitas untuk Signifikansi**

No Item	Signifikansi	Nilai Signifikansi Item	Status Data
X1	0.05	0,280	Valid
X2	0.05	0,203	Valid
X3	0.05	0,200	Valid
X4	0.05	0,200	Valid
X5	0.05	0,102	Valid
X6	0.05	0,109	Valid
X7	0.05	0,124	Valid
X8	0.05	0,128	Valid
X9	0.05	0,106	Valid
X10	0.05	0,168	Valid

Sumber : SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil dari uji validitas signifikansi pada variabel akuntabilitas (X1) menggunakan SPSS 25 dengan rata-rata status data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada variabel akuntabilitas (X1) bersifat valid.

2. Uji Validitas Transparansi (X2)

Pada uji validitas pada transparansi (X2) yang diolah dengan SPSS 25 maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel
Uji Validitas Tranparansi (X2)**

No Item	R tabel	R Hitung	Status Data
X1	0.320	0,417	Valid
X2	0.320	0,338	Valid
X3	0.320	0,351	Valid
X4	0.320	0,454	Valid
X5	0.320	0,383	Valid
X6	0.320	0,517	Valid
X7	0.320	0,371	Valid
X8	0.320	0,338	Valid
X9	0.320	0,426	Valid
X10	0.320	0,374	Valid

Sumber : SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil dari uji validitas pada variabel transparansi (X2) menggunakan SPSS 25 dengan rata-rata status data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada variabel transparansi (X2) bersifat valid.

**Tabel
Uji Validitas untuk Signifikansi**

No Item	Signifikansi	Nilai Signifikansi Item	Status Data
X1	0.05	0,109	Valid
X2	0.05	0,138	Valid
X3	0.05	0,131	Valid
X4	0.05	0,204	Valid
X5	0.05	0,218	Valid
X6	0.05	0,101	Valid
X7	0.05	0,122	Valid
X8	0.05	0,238	Valid
X9	0.05	0,108	Valid
X10	0.05	0,121	Valid

Sumber : Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil dari uji validitas pada variabel transparansi (X2) menggunakan SPSS 25 dengan rata-rata status data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada variabel transparansi (X2) bersifat valid.

Tabel
Uji Validitas untuk Signifikansi

No Item	Signifikansi	Nilai Signifikansi Item	Status Data
X1	0.05	0,109	Valid
X2	0.05	0,138	Valid
X3	0.05	0,131	Valid
X4	0.05	0,204	Valid
X5	0.05	0,218	Valid
X6	0.05	0,101	Valid
X7	0.05	0,122	Valid
X8	0.05	0,238	Valid
X9	0.05	0,108	Valid
X10	0.05	0,121	Valid

Sumber : Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil dari uji validitas signifikansi pada variabel transparansi (X2) menggunakan SPSS 25 dengan rata-rata status data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas signifikansi pada variabel transparansi (X2) bersifat valid.

2. Uji Validitas Tata Kelola (Y)

Tabel
Uji Validitas Tata Kelola (Y)

No Item	R tabel	R Hitung	Status Data
X1	0.320	0,818	Valid
X2	0.320	0,530	Valid
X3	0.320	0,756	Valid

X4	0.320	0,727	Valid
X5	0.320	0,827	Valid

Sumber : Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil dari uji validitas pada variabel tata Kelola (Y) menggunakan SPSS 25 dengan rata-rata status data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada variabel tata kelola (Y) bersifat valid.

Tabel
Uji Validitas untuk Signifikansi

No Item	Signifikansi	Nilai Signifikansi Item	Status Data
X1	0.05	0,100	Valid
X2	0.05	0,101	Valid
X3	0.05	0,120	Valid
X4	0.05	0,200	Valid
X5	0.05	0,103	Valid

Sumber : Output SPSS 25,2022

Berdasarkan hasil dari uji validitas signifikansi pada variabel tata kelola (Y) menggunakan SPSS 25 dengan rata-rata status data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas signifikansi pada variabel tata kelola (Y) bersifat valid.

Uji Reabilitas Chronbach Alpha

1. Uji reabilitas memiliki tujuan untuk dapat menentukan apakah kuesioner mempunyai konsistensi apabila pengukuran kuesioner dilakukan secara berulang kali. Pada uji reabilitas akuntabilitas (X1) dengan menggunakan SPSS 25 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel
Uji Reabilitas Akuntabilitas (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.407	10

Sumber : Output SPSS 25, 2022

Menurut pernyataan dari Nunnally dalam Ghazali (2006) bahwasanya pengujian dari normalitas data yang akan dilakukan dengan melihat satuan koefisien dari *Cronbach Alpha*, yakni nilai reabilitas yang digunakan dilihat berdasarkan masing-masing dari instrumen yakni > 0,6 akan dianggap reliabel. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya nilai reabilitas dari akuntabilitas dianggap tidak reliabel dikarenakan < 0,6 atau hanya

senilai 0,407.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Menurut pernyataan dari Ghazali (2016) bahwasanya uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji suatu data apakah pada model regresi tersebut suatu variabel yang sifatnya independen ataupun variabel yang dependen atau keduanya memiliki distribusi (penyebaran) yang normal ataupun tidak normal. Jika suatu variabel tidak melakukan distribusi dengan normal maka hasil dari uji statistik mengalami penurunan.

Kemudian pada uji normalitas terdapat nilai signifikansi yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dengan nilai signifikansi sebagai berikut : Signifikansi $> 0,05$ = normal Signifikansi $< 0,05$ = tidak normal. Hal ini dapat dikatakan bahwa signifikansi $> 0,05$ dianggap memiliki distribusi normal dan apabila signifikansi $< 0,05$ dianggap tidak memiliki distribusi normal.

Uji Normalitas Akuntabilitas (X1) terhadap Tata Kelola (Y) Peneliti menggunakan normalitas Kolmogorov Smirnov dengan hasil sebagai berikut:

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan data di atas untuk melihat data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak maka melihat pada hasil dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas yang apabila bahwa signifikansi $> 0,05$ dianggap memiliki distribusi normal dan apabila signifikansi $< 0,05$ dianggap tidak memiliki distribusi normal. Pada hasil akuntabilitas (X1) terhadap tata kelola keuangan (Y) diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.001 yang kurang dari 0.05 dari nilai signifikan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* tidak berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.001 yang kurang dari 0.05 dari nilai signifikan.

1. Uji Normalitas Transparansi (X2) terhadap (Y) Peneliti menggunakan normalitas *Kolmogorov Smirnov* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 17 Uji Normalitas Transparansi (X2) terhadap Tata Kelola (Y) menggunakan *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true	

significance.

Sumber : Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan data di atas untuk melihat data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak maka melihat pada hasil dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas yang apabila bahwa signifikansi $> 0,05$ dianggap memiliki distribusi normal dan apabila signifikansi $< 0,05$ dianggap tidak memiliki distribusi normal.

Pada hasil transparansi (X2) terhadap tata kelola keuangan (Y) diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan.

2. Uji Normalitas X1 dan X2 terhadap Y
Peneliti menggunakan normalitas

Kolmogorov Smirnov dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 18 Uji Normalitas Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) terhadap Tata Kelola (Y) menggunakan *Kolmogorov Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.09774 736
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.099
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS 25, 2022

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan data di atas untuk melihat data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak maka melihat pada hasil dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas yang apabila bahwa signifikansi $> 0,05$ dianggap memiliki

distribusi normal dan apabila signfikansi $< 0,05$ dianggap tidak memiliki distribusi normal. Pada hasil akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata kelola keuangan (Y) diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan.

Uji Heterokedastisitas

Pada uji heterokedastisitas pada akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) yang diolah dengan SPSS25 maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

Pada dasarnya, uji heterokedastisitas digunakan untuk pengujian apakah terdapat bentuk ketidaksamaan varian ataupun residual dari pengamatan satu terhadap pengamatan yang lain. Adapun beberapa ciri-ciri tidak adanya gejala dari heterokedastisitas yakni sebagai berikut :

1. Titik-titik pada gambar telah menyebar di atas dan bawah ataupun berada di sekitar angka 0
2. Titik tersebut tidak mengumpul di atas maupun di atas saja
3. Untuk penyebaran oleh titik-titik tidak boleh untuk membentuk pola yang membentuk gelombang melebar yang menyempit dan juga melebar.
4. Penyebaran titik tersebut tidak membentuk pola

Dari ciri-ciri di atas dengan melihat pada pola *scatterplots* hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode *scatterplots* dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) tidak mengalami gejala heterokedastisitas pada model dari regresi penelitian ini

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tata Kelola

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* di atas, untuk pengaruh akuntabilitas terhadap tata dapat dilihat dari data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak maka melihat pada hasil dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas yang apabila bahwa signifikansi $> 0,05$ dianggap memiliki distribusi normal dan apabila signfikansi $< 0,05$ dianggap tidak memiliki distribusi normal. Pada hasil akuntabilitas (X1) terhadap tata kelola keuangan (Y) diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.001 yang kurang dari 0.05 dari nilai signifikan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata Kelola (Y)

pada uji *Kolmogorov Smirnov* tidak berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.001 yang kurang dari 0.05 dari nilai signifikan. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara akuntabilitas (X1) dengan tata Kelola

(Y) yang berdasarkan pada hipotesis 2 (H1) dan tidak dapat diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Transparansi Terhadap Tata Kelola

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* di atas untuk melihat distribusi normal atau tidak maka melihat pada hasil dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas yang apabila bahwa signifikansi $> 0,05$ dianggap memiliki distribusi normal dan apabila signfikansi $< 0,05$ dianggap tidak memiliki distribusi normal. Pada hasil transparansi (X2) terhadap tata kelola keuangan (Y) diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara transparansi (X2) dengan Tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 2 (H2) dan dapat diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) Terhadap Tata Kelola (Y)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* di atas untuk melihat pada hasil dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas yang apabila bahwa signifikansi $> 0,05$ dianggap memiliki distribusi normal dan apabila signfikansi $< 0,05$ dianggap tidak memiliki distribusi normal. Pada hasil akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata kelola keuangan (Y) diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena

diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan.

Kemudian pada hasil uji heterokedastisitas dengan melihat pada pola *scatterplots* hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode *scatterplots* dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) tidak mengalami gejala heterokedastisitas pada model dari regresi penelitian ini yang dapat dinilai positif. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) pada tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 3 (H3) dapat diterima.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketika diuji dengan uji *Kolmogorov Smirnov* pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.001 yang kurang dari 0.05 dari nilai signifikan. Maka dalam hal ini terdapat tidak berpengaruh yang signifikan pada hubungan antara akuntabilitas (X1) dengan tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 2 (H1) dan tidak dapat diterima atau tidak valid.
2. Pengaruh transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) pada uji *Kolmogorov Smirnov* berdistribusi normal karena diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.200 yang lebih dari 0.05 dari nilai signifikan. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara transparansi (X2) dengan Tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 2 (H2) dan dapat diterima.
3. Kemudian ketika diuji dengan uji heterokedastisitas menggunakan metode *scatterplots* dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap tata Kelola (Y) tidak mengalami gejala heterokedastisitas pada model dari regresi penelitian ini yang dapat dinilai positif. Maka dalam hal ini terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan antara akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) pada tata Kelola (Y) yang berdasarkan pada hipotesis 3 (H3) dapat diterima.
4. Tidak adanya pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola anggaran dikarenakan uji *Kolmogorov* bersifat valid dan dapat diterima, tetapi ketika diuji dengan uji heterokedastisitas akuntabilitas menjadi valid dan diterima. Hal ini ketika ditambah satu variabel tambahan terdapat pengaruh yang signifikan, valid dan dapat diterima dengan alasan adanya pengaruh dari tambahan satu variabel tersebut yang dapat mempengaruhi hasil dari uji heterokedastisitas

yang menggunakan tiga variabel.

Saran

1. Dengan melatarbelakangi masalah dan problem solving yang ditolak pada variabel akuntabilitas maka terdapat beberapa
2. Agar anggaran dapat terserap dengan maksimal yakni dengan adanya sinergi yang dibentuk oleh Aparatur Penegak Hukum serta Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) yang kemudian dapat diwujudkan. Dengan adanya sinergi tersebut akan memberikan keyakinan yang lebih besar pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan tanpa khawatir untuk berhadapan dengan persoalan hukum di masa depan. APIP kemudian akan bersinergi dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Ketiga komponen ini kemudian akan memberikan pendampingan pada seluruh satuan kerja perangkat daerah pada Kota Batu serta para kuasa atas penggunaan anggaran sehingga seluruh SKPD tidak merasa takut hingga serapan anggarannya menjadi tidak maksimal. Selanjutnya untuk dapat mensinergikan tugas dari APIP, Kepolisian, Kejaksaan serta BPK untuk melakukan optimalisasi target serta monitoring untuk realisasi anggaran, serapan anggaran APBD Tahun 2020/2021 yang harus dilakukan dengan berbagai langkah serta kebijakan hukum. Termasuk pembangunan tata kelola pemerintah yang bersifat efektif, efisien serta taat hukum.
3. Faktor penghambat dari pengelolaan anggaran APBD yang dilakukan oleh BKAD sebaiknya untuk server pusat yang ada di Kemendagri agar segera diperbaiki dan server segera di distribusikan ke masing-masing daerah di Indonesia
4. Hipotesis akuntabilitas (X1) yang ditolak kemudian selanjutnya dapat memberikan beberapa penyelesaian masalah (problem solving) yakni melakukan suatu bentuk reformasi pada penyajian laporan keuangan yakni Pemerintah Kota Batu dapat menyediakan seluruh informasi keuangan dengan relevan dengan jujur serta terbuka pada public. Hal ini dikarenakan kegiatan daerah pemerintah yakni dalam melaksanakan amanat dari rakyat untuk dapat mengelola keuangan daerah. Sebuah penyajian laporan keuangan yang lengkap serta langsung tersedia serta adanya aksesibilitas untuk pengguna informasi. Selain itu melakukan peningkatan pada nilai komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan hingga capaian kinerja yang dapat menunjukkan tingkat efektivitas dari

akuntabilitas keuangan serta efisiensi penggunaan pada anggaran yang baik.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. *Pengintegrasian Akuntabilitas Kinerja pada Proses Perencanaan dan Penganggaran – Upaya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021. *Pengendalian Covid-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten (Buku 2)*.

Sumber Jurnal/Artikel

- Arwani, Ahmad. 2015. “Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2013 (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan).” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Brawijaya 2015
- Auditya. Husaini, Lismawati. 2013. “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013:21- 42 Program Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013:21-42 Program Magister Akuntansi, Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu
- Basri, Gusnardi. 2021. “Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau).” Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Program Studi S1 Akuntansi Universitas Riau
- Ireeuw, Stevani. 2019. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Volume 14, Nomor 1, Mei 2019:87-99. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Volume 2 Nomor 3, 2018 Hal 149-162.
- Nuhung, Ari Ekawaty. 2021. “Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat”. Tesis Program Studi

- Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Pradana, I Putu Yoga Bumi. 2014. “Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang”. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP Vol 18 No 2 – November 2014. Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur.
- Putra, Gerryan. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”. Artikel Program Studi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- South, Tinangon, Rondonuwu. 2016. “Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal Emha Vol. 4 No.1 Maret 2016 Hal 613-622 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Sriwijayanti, Hari. 2018. “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang).” Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 7, No.1, April 2018, Hal 88 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia.
- Wahyuniar. 2017. “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sumber Internet/Website

- Akhir Tahun Serapan Anggaran Pemerintah Kota Batu dalam <https://batuhits.com/4101-akhir-tahun-serapan-anggaran-pemerintah-kota-batu-masih-5243-persen?amp> diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Pukul 16.05 WIB
- Amisepti, Anisa. 2017. Peran SKPD dalam Menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang Kredibel dan Akuntabel dalam website <https://monitor.co.id/2017/06/01/peran-skpd-dalam-menghasilkan-laporan-keuangan-daerah-yang-kredibel-dan-akuntabel/> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 15.06 WIB
- Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan. 2019. Dalam website <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan> diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 14.05 WIB

- Data Anggaran dan Realisasi APBD dalam Penanganan Covid-19 SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 23.05 WIB
- Data Anggaran dan Realisasi APBD dalam Penanganan Covid-19 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Batu dalam website resmi PPID Kota Batu Tahun Anggaran 2020 pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 12.03 WIB
- Data Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 00.01 WIB
- Data Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2021 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 23.07 WIB
- Humas Kota Batu. 2020. Dalam website <https://humas.batukota.go.id/2020/06.30>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019. 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 18.09 WIB
- Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Wabah *Corona Virus Disease* 2019. 2020. Dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 07.01 WIB
- Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Wabah *Corona Virus Disease* 2019. 2020. Dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 18.47 WIB
- Peraturan Walikota Batu Nomor 440/160/422.031/2021. 2021. Tentang Surat Edaran Walikota Batu Nomor 440/160/422.031/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Batu. Dalam website resmi PPID Kota Batu pada <https://ppid.batukota.go.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 13.04 WIB
- Yusron Sumartono, SE. 2017. Struktur Pengelola Keuangan Daerah – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dalam website <https://ap.surabaya.go.id> diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 13.04 W

